



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

20
22

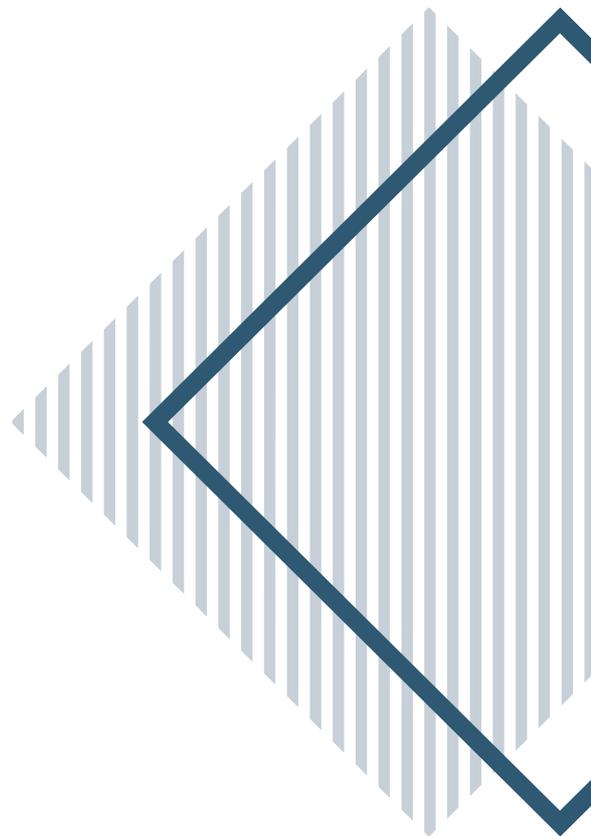


MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

TERDAPAT INOVASI PELAYANAN

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL





LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

Daftar Isi

1. TikTok (Usulan Agar MK Aktif di Platform TikTok)
2. TikTok (Undangan Rapat Perdana dengan Vendor)
3. TikTok (Pasca ACC - Permohonan Negosiasi)
4. Foto Publikasi Sidang Putusan MK di Media Sosial MK (Pra).jpeg
5. Foto Publikasi Sidang Putusan MK di Media Sosial MK (Pasca 1,2 dan 3)
6. Publikasi Berita 1 Menit Sidang MK (Reels) di Medsos MK
7. [AFTER] Template dan Layout Konten MK 2022 (Pasca Monev)
8. [BEFORE] Template dan Layout Konten MK 2022 (Pra Monev)
9. [BEFORE] Ikon Hak Konstitusional WN (Usulan)
10. [BEFORE] Ikon Hak Konstitusional WN (Konsinyering)
11. [AFTER] Ikon Hak Konstitusional WN (Konsep)
12. [AFTER] Ikon Hak Konstitusional WN (Hasil 1).
13. [AFTER] Ikon Hak Konstitusional WN (Hasil 2).
14. Nota Kesepahaman dengan TTD-e.
15. Penugasan Pembangunan Sistem Kepesertaan Simposium Internasional MK
16. Laporan dan Koordinasi Pengembangan Laman AACC
17. Laporan dan Koordinasi Pengembangan en.mkri.id
18. [AFTER] Laman AACC Pasca Koordinasi
19. [AFTER] Laman MK Dalam Bahasa Inggris
20. Sistem Kepesertaan Simposium Internasional MK (e-Certificate)
21. Sistem Registrasi Simposium Internasional MK (Admin Approval)
22. [BEFORE] Usulan Penggunaan Sistem Monitoring Media dan Digitalisasi Kliping. [BEFORE] Persetujuan Sekretaris Jenderal Guna Monitoring Media.
23. [AFTER] Pemanfaatan Sistem Media Monitoring.
24. Informasi Mengenai UUD 1945 Huruf Braille dan Bahasa Daerah.
25. Usulan Pengembangan Fitur Layanan Wartawan.
26. Persetujuan Sekretaris Jenderal (Pengembangan Fitur)
27. Fitur Layanan Wartawan (Registrasi Wartawan).
28. Akses Majalah KONSTITUSI dalam Fitur Flip Book.

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

Daftar Isi

29. [BEFORE] Akses Majalah KONSTITUSI (PDF)
- 30.[AFTER] Flip Book Majalah KONSTITUSI.
- 31.[AFTER] YouTube MK Centang Biru.
- 32.[AFTER] Instagram MK Centang Biru.
- 33.[AFTER] Twitter MK Centang Biru.
- 34.Produksi ILM MK 2021 Secara Swakelola (BTS 1).
- 35.Produksi ILM MK 2021 Secara Swakelola (BTS 2).
- 36.Medsos MK PASCA Pengelolaan oleh Tim Media Sosial.
- 37.Percakapan Courtizen dengan Courtmin di DM IG (1).
- 38.Tanya Jawab Dengan MK Via IG.
- 39.Percakapan Courtmin dengan Courtizen via Komen IG
- 40.Info Hasil Putusan MK via IG.PNG
- 41.Percakapan Courtizen dengan Courtmin di DM IG
- 42.Undangan Rapat Kalender Konten.
- 43.Contoh Kalender Konten Pasca Pengelolaan oleh Tim Media Sosial.
Contoh ND Pengusulan Kalender Konten Pasca Pengelolaan.
- 44.Pengumuman Streaming Sidang Via IG.
- 45.Spotify Podcast Supaya Presisi Memahami Konstitusi (Supremasi).
46. internal.mkri.id (Memasukkan Kegiatan).
- 47.internal.mkri.id (Mengajukan Penugasan).
- 48.[AFTER] Jadwal Liputan Merujuk internal.mkri.id

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
NOMOR 1439//HP.15/04/2022**

Yth. : Kepala Biro Humas dan Protokol
Dari : Kepala Bagian Humas dan KSDN
Perihal : Hasil Telaah Penawaran Kerjasama Publikasi PT Arkadia Digital Media/ suara.com

Dengan hormat, unit kerja subbagian Humas telah menerima penawaran dari PT Arkadia Digital Media/ suara.com (terlampir), berkenaan dengan tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. Arkadia Digital Media merupakan perusahaan digital media yang mengelola *platform media digital*; membuat konten dalam berbagai format untuk penggunaan internal dan eksternal; menyediakan konten yang berharga bagi perusahaan telekomunikasi; serta membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai *media player digital*. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga negara untuk pembuatan konten.
2. Pada penawaran kerja sama kali ini, PT. Arkadia menawarkan produksi konten Tiktok sebanyak 20 video berdurasi satu menit dengan harga Rp. 166.500.000 (selama tiga bulan) yang meliputi ide konsep, pengambilan gambar, dan pembuatan konten video.
3. Saat ini, MK belum memiliki akun resmi Tiktok yang mana merupakan salah satu saluran media sosial berbagi video yang saat ini sangat digemari dan efektif sebagai media publikasi. Dilihat dari hasil survey pada 2021 lalu, pengguna Tiktok di Indonesia mencapai angka 92,2 juta pengguna, dengan durasi penggunaannya lebih lama dibandingkan saluran media sosial lainnya seperti *Instagram* dan *Facebook*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa MK perlu untuk mempertimbangkan kerja sama dimaksud. Dimana penyebaran informasi tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi melalui Tiktok menjadi salah satu media publikasi yang sangat efektif. Selain itu harga yang ditawarkan pun cukup sepadan dengan yang akan diterima oleh MK.

Demikian telaah ini kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Humas dan KSDN, **Fajar Laksono**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

14 April 2022

Nomor : 484/HP.01.02/04/2022
Hal : Rapat Konten Media Sosial MK

Yth.

Peserta Rapat

(Daftar Terlampir)

di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti penawaran kerja sama Arkadia Digital (suara.com) terkait produksi konten media sosial Mahkamah Konstitusi (Tiktok), kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat yang diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 18 April 2022
Waktu : 08.00 - 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 11 Gedung 1 MK
Pimpinan Rapat : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**



Digital Signature
mk220451145220412023233

Lampiran Undangan Rapat

Nomor : 484/HP.01.02/04/2022

Tanggal : 14 April 2022

Daftar Peserta Rapat

1. M. Guntur Hamzah
2. Heru Setiawan
3. Fajar Laksono
4. Mutia Fria Darsini
5. Andhini Sayu Fauzia
6. Fitri Yuliana
7. M. Halim
8. Raisa Ayudhita
9. Tiara Agustina
10. Ilham Erwin
11. Zahra Marida



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

NOMOR 20 April 2022

Kepada Yth. : Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN
Dari : Kepala Bagian Humas dan KSDN
Hal : Permohonan Negosiasi Konten Media Sosial
Tanggal : 20 April 2022

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi, dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai arahan dan persetujuan Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Arkadia Digital Media. Sesuai dengan penawaran, kerja sama dilakukan untuk produksi video konten media sosial melalui *platform* Tik Tok sebagai strategi kekinian untuk mempublikasikan kegiatan persidangan maupun non-persidangan MK secara lebih singkat, jelas, dan menarik.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kerja sama Unit Layanan Pengadaan untuk kiranya dapat melakukan negosiasi atas penawaran harga yang diajukan oleh Arkadia Digital Media sebagaimana terlampir dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Humas dan KSDN,
Fajar Laksono



Digital Signature
mk455563764220420032247



May 31 9:18 AM

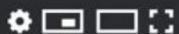


LIVE SIDANG

Selasa, 31 Mei 2022

PENGUCAPAN PUTUSAN/ KETETAPAN

10:45 / 65:00



SUBSCRIBED



Mahkamah Konstitusi RI



YOUTUBE.COM



officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



www.mkri.id

Boost

Highlight

More



May 31 3:36 PM



SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

31 Mei 2022

PUU :

1. No. 45/PUU-XX/2022
UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Putusan: **Mengabulkan Permohonan Penarikan Kembali**
2. No. 46/PUU-XX/2022
UU Administrasi Pemerintahan
Putusan: **Mengabulkan Permohonan Penarikan Kembali**
3. No. 55/PUU-XX/2022
UU Pilkada
Putusan: **Mengabulkan Permohonan Penarikan Kembali**
4. No. 2/PUU-XX/2022
UU Pilkada
Putusan: **Mengabulkan Sebagian**
5. No. 31/PUU-XX/2022
UU Pemerintahan Daerah
Putusan: **Mengabulkan Sebagian**

 MKRI.ID



officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



www.mkri.id

Boost

Highlight

More



May 31 3:36 PM



SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

31 Mei 2022

PUU :

6. No. 39/PUU-XX/2022
UU Ibu Kota Negara
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
7. No. 40/PUU-XX/2022
UU Ibu Kota Negara
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
8. No. 47/PUU-XX/2022
UU Ibu Kota Negara
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
9. No. 48/PUU-XX/2022
UU Ibu Kota Negara
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
10. No. 53/PUU-XX/2022
UU Ibu Kota Negara
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**

 MKRI.ID



officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



www.mkri.id

Boost

Highlight

More



May 31 3:37 PM



SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

31 Mei 2022

PUU :

11. No. 54/PUU-XX/2022
UU Ibu Kota Negara
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
12. No. 41/PUU-XX/2022
UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
13. No. 42/PUU-XX/2022
UU Pemilu
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
14. No. 50/PUU-XX/2022
UU Merek dan Indikasi Geografis
Putusan: **Tidak Dapat Diterima**

 MKRI.ID



officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



www.mkri.id

Boost

Highlight

More

Reels

08:36 WIB

Komentar 22
[Lihat Foto](#)

mahkamahkonstitusi

kan p... tentang perkembangan kasus COVID-19 khususnya varian Omicron di Istana Kepresidenan, (ANTARA FOTO/Biro Pers)

Perpindahan Ibu Kota Negara memang tengah menjadi perhatian publik. Buktinya? Sudah terdapat sebanyak sembilan permohonan pengujian UU IKN. Salah satunya, MK menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden yang dimohonkan oleh dua belas Pemohon perorangan yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).

#MengawalKonstitusi

#salaMKonstitusi mantan Timur.

#MKRI

#UUIKN

🎵 mahkamahkonstitusi · Original Audio



529



11



...





Ingin Bisa Nikahi Wanita Muslim, Pria Katolik Uji UU Perkawinan



mahaMahaKonstitusi 

"Tuhan memang satu namun kita yang tak sama".

Adakah di antara #Courtizen yang memiliki kisah cinta seperti E. Ramos Petege? Yuk sini curhat sama #Courtmin 😊

#MengawalKonstitusi

#salaMKonstitusi

#MKRI

#UUPerkawinan

*Ralat : Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR RI)

🎵 mahaMahaKonstitusi · Original Audio



728



44



...






Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia

Pasal 28 G ayat 3 UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”



Pengujian Formil dan Materiil UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan

No. 58, 59, 60/PUU-XX/2022
Pemeriksaan Pendahuluan



MAJALAH KONSTITUSI

Edisi April 2022



Jabatan dan kedudukan seharusnya tak mengubah kesahajaan.

Mohammad Nafis
1908 - 1993

Defamation

Suatu tindakan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan atau dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik.




Pengujian Materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

No. 38/PUU-XIX/2021
Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Dewan Pers dan Ahli serta Saksi PWI



Pengujian Materiil UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

No. 63/PUU-XX/2021
Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait [Puji Rahaesita, S Fahmi Shahab, Slamet Adriyadic, Sugito, Richard Kyoto]



Pengujian Materiil UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

No. 63/PUU-XX/2021
Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait [Puji Rahaesita, S Fahmi Shahab, Slamet Adriyadic, Sugito, Richard Kyoto]



Latar Belakang Hari Kebangkitan Nasional



Pengujian Materiil UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

No. 47/PUU-XIX/2021
Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden

UU SISTEM PERBUKUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 (UU Sisbuk)

- Dibuatkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Mei 2017.
- Terdapat 11 Bab dan 12 Pasal. Proses perundangan berlangsung selama 1 tahun 2 bulan.
- UU Sisbuk membagi jenis buku menjadi dua, yaitu buku pendidikan dan buku umum.
- Memberikan kepastian hukum kepada pelaku perbukuan serta hak dan kewajibannya.

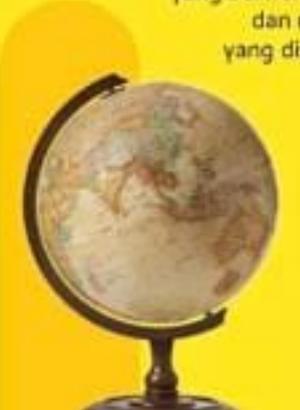



Menghentikan perjuangan berarti penghianatan terhadap cita-cita semula dan terhadap korban-korban yang telah jatuh mati atau cacat di medan perjuangan.

Prwiranegara
1911-1989

Extradition

Penyerahan kepada negara yang berwenang untuk mengadili dan memidana seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan.




Pengujian Materiil UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

No. 65/PUU-XIX/2021
Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia

JUST MERCY (2019)

Film ini mengangkat kisah nyata mengenai pengacara lulusan Harvard, Bryan Stevenson yang dipersonakan oleh Michael B. Jordan dalam memperjuangkan keadilan.

Demi mendobrak sistem hukum Amerika Serikat dari bayangan realisme, Bryan mendirikan Equal Justice Initiative bersama Eva Ansley yang dipersonakan oleh Brie Larson untuk menolong berbagai kasus. Khususnya perjuangan bagi warga kulit hitam yang terancam hukuman mati tanpa proses peradilan jelas dan tidak transparan.



IMDb 7,8/10
Rotten Tomatoes 85%



“
Majukan perempuan
dengan pendidikan
agar mereka merdeka
”



H.H. Bahma Said
1931-1993



TERRA NULLIUS

Terra nullus memiliki arti yaitu suatu wilayah yang tidak bertuan atau tidak menjadi bagian dari negara manapun. Wilayah terra nullus memiliki potensi besar akan timbulnya konflik antar negara, konflik atas wilayah terra nullus mayoritas terletak di perbatasan antara pulau-pulau terluar suatu negara dengan negara-negara tetangga, konflik yang terjadi biasanya berbentuk overlapping claim atau saling mengklaim atas wilayah terra nullus.

Sumber: Black's Law Dictionary Seventh Edition (1998)




KONpress
Khasanah peradaban hukum & konstitusi

KONpress atau Konstitusi Press merupakan unit penerbitan yang saat ini pengelolaannya dibawah Koperasi Konstitusi

KONpress berfokus pada penerbitan buku-buku berkategori hukum dan konstitusi dengan moto "Khasanah Peradaban Hukum dan Konstitusi"

Pengujian Materil UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap UUD 1945

Perkara No. 35/PUU-XX/2013
Agenda: Pemeriksaan Pendahuluan



SALDU ISRA

Apa itu?

Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi

- Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan suatu negara
- Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang disebut UUD dan dapat pula tidak tertulis

Konstitusionalisme

- Konstitusionalisme merupakan paham politik yang beranggapan konstitusi merupakan sumber kekuasaan pemerintah negara



Sumber: www.konstitusi.konstitusi.com dan Konstitusionalisme Indonesia, Spriyandika, Jakarta, 2016

Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap UUD 1945

Perkara No. 53/PUU-XX/2022
Agenda: Pemeriksaan Pendahuluan




PETITIONER = PEMOHON
LEGAL STANDING = KEDUDUKAN HUKUM

"The Justice asked the petitioner to elaborate his legal standing"
Hakim meminta pemohon untuk menjelaskan kedudukannya

“
Karena ada bunga mati,
maka banyaklah buah
yang tumbuh. Demibianlah
pula dalam hidup manusia.
Karena ada angan-angan
muda mati, kadang-kadang
timbulah angan-angan lain,
yang lebih sempurna,
yang boleh
menjadikannya buah.
”



Raden Adjeng Kartini
1879-1904



UU IKN digugat DPR-Presiden beri Keterangan di MK

Undang-undang IKN dianggap para pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi proses deliberasi yang cukup dan bermutu.

Perkara Bahama Widyanti
7 Maret 2022, 10:16



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

? Nama acara ramadan yang diselenggarakan MK mulai hari ini sampai besok?



Sidang Pengucapan Putusan Rabu, 20 April 2022

Perkara Nomor:

- 3/PUU-XX/2022
- 2/PUU-XX/2022
- 13/PUU-XX/2022
- 14/PUU-XX/2022
- 15/PUU-XX/2022
- 16/PUU-XX/2022
- 20/PUU-XX/2022
- 21/PUU-XX/2022
- 23/PUU-XX/2022
- 24/PUU-XX/2022
- 25/PUU-XX/2022
- 57/PUU-XX/2021



Indonesia Mengadi Tuan Rumah Konferensi Bersama Asosiasi MK se-Asia dan se-Afrika



WICC, Host City, Will soon welcome the 6th Congress of the WICC

Pada 9 Agustus 2012, Sole Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACCI) dan Constitutional Court of Africa (CCJA) mengadakan MoU yang memprakarsai Joint Conference atau konferensi bersama.

Dalam the 6th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WICCJ) yang rencananya diselenggarakan pada 4-8 Oktober 2022 di Raji Nusa Dua Convention Center, akan dibacakan pula Joint Conference of AACCI and CCJA. Acara ini diharapkan mampu menghidupkan kembali kerja sama antara Asia dan Afrika dengan melibatkan peran Mahkamah Konstitusi.

Pengujian Materil UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Perkara No. 37/PUU-XX/2021
Agenda: Mendengarkan Keterangan Ahli dan Soal Presiden



Pengujian Materil UU No. 2 Tahun 2008

NOTA DINAS
Nomor 350/2300/HP.01.04/06/2021

Kepada : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Rencana Kegiatan Konsinyering Penyusunan ICON Hak Konstitusi Warga Negara
Tanggal : 24 Juni 2021

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa unit kerja Humas sedang melaksanakan penyusunan Icon Hak Konstitusi Warga Negara (HKWN). Terkait kegiatan dimaksud, dalam upaya untuk dapat menyelesaikan sebanyak 87 Icon HKWN maka kami mengusulkan untuk dilaksanakan kegiatan konsinyering Penyusunan Icon HKWN pada tanggal 28 – 30 Juni 2021 yang bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor. Adapun anggaran yang diperlukan untuk tercapainya tujuan kegiatan dimaksud akan dibebankan pada anggaran **Humas di Biro Humas dan Protokol**.

Demikian rencana kami sampaikan, mohon arahan dan persetujuan Bapak. Sekiranya bapak tidak berpendapat lain, kami akan melaksanakan rencana sebagaimana dikemukakan di atas. Atas perhatian, persetujuan dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi





HAK SIPIL DAN POLITIK (orang)



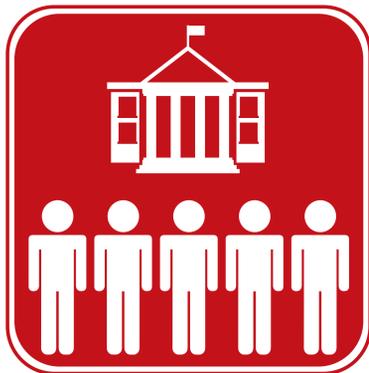
7. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C Ayat (1)]



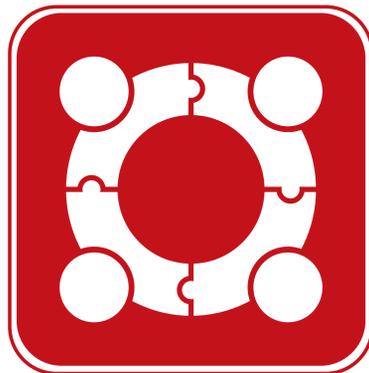
10. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C Ayat (1)]



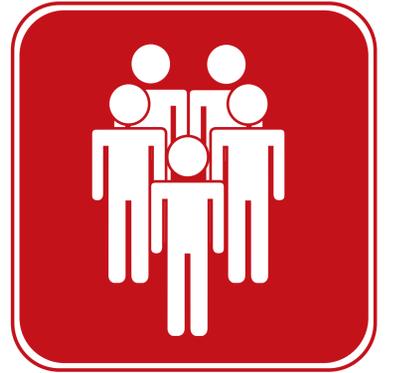
12. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D Ayat (1)]



14. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D Ayat (3)]



25. Hak atas kebebasan berserikat [Pasal 28E Ayat (3)]



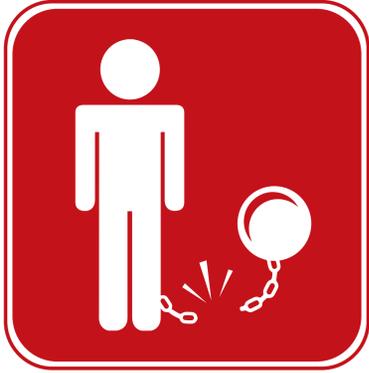
26. Hak atas kebebasan berkumpul [Pasal 28E Ayat (3)]



27. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat [Pasal 28E Ayat (3)]



28. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya [Pasal 28F]



45. Hak untuk tidak diperbudak [Pasal 28I Ayat (1)]



46. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum [Pasal 28I Ayat (1)]



86. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 pengujian UU Advokat)



30. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya [Pasal 28G Ayat (1)]



31. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [Pasal 28G Ayat (1)]



32. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia [Pasal 28G Ayat (1)]



33. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain [Pasal 28G Ayat (1)]



42. Hak untuk tidak disiksa [Pasal 28I Ayat (1)]



43. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani [Pasal 28I Ayat (1)]



50. Hak atas grasi dan rehabilitasi yang diberikan Presiden [Pasal 14 Ayat (1)]



59. Hak memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [Pasal 28J Ayat (1)]



78. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 Ayat (1)]



81. Hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat



82. Hak untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu yang diisi melalui pemilihan



85. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan,



87. Hak atas praduga tak bersalah (Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 pengujian UU KPK)

HAK SIPIL DAN POLITIK (benda)



1. Hak untuk hidup (Pasal 28A)



2. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)



11. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D Ayat (1)]



15. Hak atas status kewarganegaraan [Pasal 28D Ayat (4)]



19. Hak untuk bebas memilih kewarganegaraan [Pasal 28E Ayat (1)]



20. Hak untuk bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara [Pasal 28E Ayat (1)]



21. Hak untuk meninggalkan negaranya [Pasal 28E Ayat (1)]



22. Hak untuk kembali lagi ke negaranya [Pasal 28E Ayat (1)]



23. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya [Pasal 28E Ayat (2)]



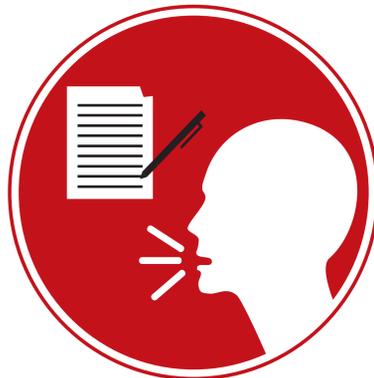
24. Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya [Pasal 28E Ayat (2)]



52. Hak atas gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang [Pasal 15]



66. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 Ayat (3)]



67. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang [Pasal 28]



29. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia [Pasal 28F]



47. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut [Pasal 28I Ayat (1)]



51. Hak atas amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden [Pasal 14 Ayat (2)]



57. Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama pemerintah [Pasal 28I Ayat (4)]



58. Hak atas peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis [Pasal 28I Ayat (5)]



60. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1)]



79. Hak memperoleh jaminan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan beribadat masing-masing [Pasal 29 Ayat (2)]



83. Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali [Pasal 22E Ayat (1)]



84. Hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis [Pasal 18 Ayat (4)]

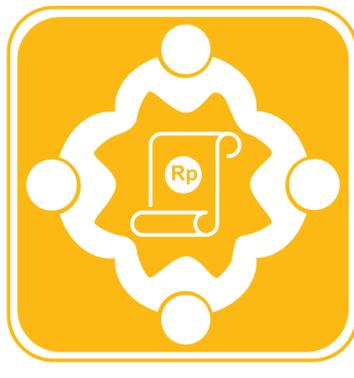
HAK EKONOMI (orang)



34. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin [Pasal 28H Ayat (1)]



35. Hak untuk bertempat tinggal [Pasal 28H Ayat (1)]



75. Hak atas kebijakan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 Ayat (1)]



74. Hak atas penghormatan dan pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional oleh negara [Pasal 32 Ayat (2)]



41. Hak atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara se-wenang-wenang oleh siapapun [Pasal 28H Ayat (4)]

HAK EKONOMI (benda)



71. Hak atas kebijakan negara yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah [Pasal 31 Ayat (4)]



13. Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D Ayat (2)]



77. Hak atas terselenggaranya perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 34 Ayat (4)]



80. Hak atas pengaturan dengan undang-undang berkenaan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara [Pasal 23A]



40. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi [Pasal 28H Ayat (4)]

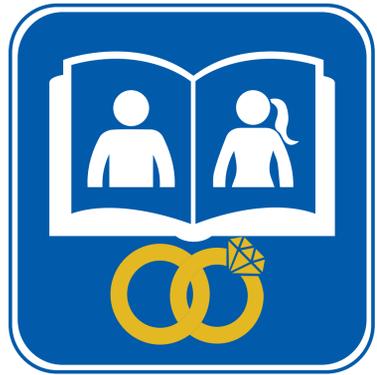


76. Hak atas terselenggaranya perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian [Pasal 33 Ayat (4)]



62. Hak untuk memperoleh pengembangan sistem jaminan sosial oleh negara sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 Ayat (2)]

HAK SOSIAL (orang)



3. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah [Pasal 28B Ayat (1)]



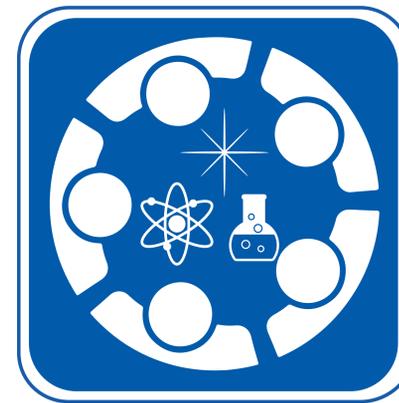
4. Hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah [Pasal 28B Ayat (1)]



18. Hak untuk bebas memilih pekerjaan [Pasal 28E Ayat (1)]



39. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat [Pasal 28H Ayat (3)]



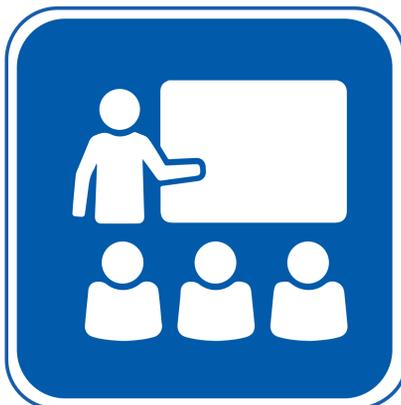
72. Hak atas pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pemerintah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 Ayat (5)]



44. Hak beragama [Pasal 28I Ayat (1)]



54. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 Ayat (2)]



68. Hak untuk mendapat pendidikan [Pasal 31]



69. Hak mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah [Pasal 32 Ayat (2)]



71. Hak atas pengusahaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [Pasal 31 Ayat (3)]

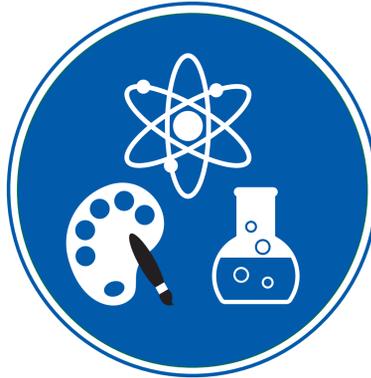
HAK SOSIAL (benda)



37. Hak memperoleh pelayanan kesehatan [Pasal 28H]



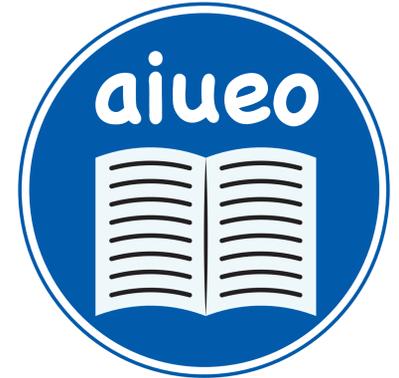
8. Hak untuk mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C Ayat (1)]



9. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C Ayat (1)]



16. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya [Pasal 28E Ayat (1)]



17. Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran [Pasal 28E Ayat (1)]



64. Hak atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagai tanggung jawab negara [Pasal 34 Ayat (3)]



73. Hak atas pemajuan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 Ayat (1)]



65. Hak atas tersedianya fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 Ayat (3)]

HAK BUDAYA (benda)



36. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat [Pasal 28H Ayat (1)]

1

HAK KELOMPOK RENTAN (orang)



5. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang [Pasal 28B Ayat (2)]



6. Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [Pasal 28B Ayat (2)]



48. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun [Pasal 28I Ayat (2)]



49. Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif [Pasal 28I Ayat (2)]



63. Hak masyarakat lemah dan tidak mampu untuk diberdayakan oleh negara sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 Ayat (3)]



38. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28H Ayat (2)]



61. Hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara negara [Pasal 34 Ayat (1)]

HAK KELOMPOK RENTAN (benda)



53. Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dengan undang-undang terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa [Pasal 18B Ayat (1)]



55. Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dalam undang-undang terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia [Pasal 18B Ayat (2)]



56. Hak memperoleh penghormatan negara atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [Pasal 18B Ayat (4)]

**HAK
SIPIL
DAN
POLITIK**

**HAK
EKONOMI**

**HAK
SOSIAL**

**HAK
BUDAYA**

**HAK
KELOMPOK
RENTAN**



HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



HAK INDIVIDUAL



PASAL 28H Ayat (4)

Hak untuk mempunyai hak milik pribadi

EKONOMI

30

HAK INDIVIDUAL



PASAL 31

Hak untuk mendapat pendidikan

SOSIAL

31

NOTA DINAS

Nomor 599/2300/HP.00.04/11/2020

Kepada : Plt. Pusat TIK
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Usulan Aplikasi Kehadiran dan Layanan Pers/Wartawan
Tanggal : 13 November 2020

Sehubungan dengan kebutuhan untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan dukungan pelayanan kepada publik, utamanya kepada kalangan pers, kami mengusulkan perlunya aplikasi berkenaan dengan kehadiran dan layanan kepada wartawan media massa yang melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi.

Kiranya, aplikasi tersebut dapat diterapkan pada masa pelaksanaan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 pada Desember 2020. Tidak tertutup kemungkinan diaplikasi pada masa selanjutnya. Selain praktis dan modern, aplikasi dimaksud akan memudahkan dan mempercepat proses pendataan, pemantauan, dan rekapitulasi kehadiran wartawan yang liputan di MK, termasuk juga untuk keperluan penyusunan laporan.

Pada pokoknya, kami berharap aplikasi tersebut menggunakan sistem *scan barcode* atau *QR Code* melalui gadget dengan meminta wartawan memasukkan data sebanyak satu kali di awal sekurang-kurangnya berupa (1) nama wartawan, (2) nama media massa, dan (3) nomor ID press yang masih berlaku. Selanjutnya, setiap kali yang bersangkutan hadir liputan di MK, *scan barcode* sebagai penanda kehadiran, kemudian secara sistem, data terbaca dan dapat ditampilkan.

Demikian kami sampaikan, sekiranya diperlukan koordinasi dan diskusi lebih lanjut, kami siap. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selamat Datang **Muhammad Halim** Anda Login Sebagai **Sekretaris** | [Ubah Kata Sandi](#)

PENCARIAN

- Beranda
- Draf Surat
- Registrasi Naskah
- Naskah Masuk
- Log Registrasi
- Berkas
- Laporan
- Keluar

Detail Naskah

- [Kembali](#)
- [Teruskan](#)
- [Nota Dinas](#)
- [Disposisi](#)
- [Ubah Metadata](#)
- [Grafik](#)

- Tindaklanjut Masuk
- Histori Naskah
- Metadata
- Status Pemberkasan

Upload Surat Final
 (Dipergunakan untuk mengupload hasil scan naskah yang telah ditandatangani pimpinan dan diberikan nomor naskah)

45 Surat | 17 Permohonan TTD | 3 Tembusan | 17 Disposisi | 25 Notadinas

Tampilkan Data Pencarian :

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
1	19-12-2020 16:50:15	Sekretaris Jenderal	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Disposisi (Biasa)	<ul style="list-style-type: none"> ACC utk ditindaklanjuti sesuai ketentuan, prosedur, dan AUPB. Laporkan hasilnya.
2	13-11-2020 13:00:54	Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum (Muhammad Halim) Penanda Tangan : Heru Setiawan	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Nota Dinas (Biasa)	<p>File Surat::</p> <ul style="list-style-type: none"> file e-TTD NOTA DINAS_DAFTARHADIRPERS.docx <p>Aktifkan QR Code111</p> <p>QR code tidak aktif</p>



select id,jenis,nama_jenis,tc_char(tgl_datang_YYYY-MM-dd) as tgl,tc_char(tgl_datang(PPO4M7)) as wkt,media,namamedia,email from t_jema where jenis = 2 and hapus = 0 and id_sorotan is not null order by tgl_datang desc;

- DASHBOARD
- DASHBOARD
- PERSIDANGAN
- PUBLIKASI
- KEHLIMASAN
- KERJASAMA
- INTERAKSI MASYARAKAT
- WARTAWAN

👤 | Kerjasama

Pencarian

CONVERT EXCEL

Tanggal: s/d

No	Tanggal Kunjungan	Nama	Media	Email	Aksi
1	2021-06-17 11:25	Ivan Januari	Metro tv (Elektronik)	januari.ivan@gmail.com	Hapus
2	2021-06-17 11:04	Gema Tanjung	Metro TV (Elektronik)	gemaanda@gmail.com	Hapus
3	2021-06-17 10:15	Adam Dwi	Media Indonesia (Cetak)	a_ditra@yahoo.com	Hapus
4	2021-06-17 10:13	Jessica Aurelia Koroh	Radio Elshinta (Elektronik)	chikakoroh@gmail.com	Hapus
5	2021-06-16 11:56	Mohamad Irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohurfan1926@gmail.com	Hapus
6	2021-06-15 12:06	Denny Marsales	Karya Jurnals & Buser Bhayabgkara (Online)	michael.yusuf82@gmail.com	Hapus
7	2021-06-15 12:05	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
8	2021-06-15 12:05	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
9	2021-06-15 12:05	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
10	2021-06-15 12:04	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
11	2021-06-15 12:04	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
12	2021-06-15 11:56	Emawinarti	Newsbisnis.id (Online)	winatpru@gmail.com	Hapus
13	2021-06-15 11:46	Luky auryani zaenal	Belombangberita.com (Online)	sunlucky321@gmail.com	Hapus
14	2021-06-15 11:44	Irwani Hasholan Sismamata	MediaPatriot.co.id (Online)	irwan.mediapatriot@gmail.com	Hapus
15	2021-06-15 11:42	Lucky Indrawan	mediatipikorindonesia.com (Online)	luckyindrawan892@gmail.com	Hapus
16	2021-06-15 11:41	Supriyanto	Kompasindo.net (Online)	andreassupriyanto7@gmail.com	Hapus
17	2021-06-15 11:07	Adam Dwi	Media Indonesia (Cetak)	a_ditra@yahoo.com	Hapus
18	2021-06-14 11:14	Mohamad Irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohurfan1926@gmail.com	Hapus
19	2021-06-10 10:30	Sigid Kurniawan	LKEN Antara (Online)	sigidmaneh@gmail.com	Hapus
20	2021-06-09 13:45	Mohamad Irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohurfan1926@gmail.com	Hapus
21	2021-06-08 11:27	Adam Dwi	Media Indonesia (Cetak)	a_ditra@yahoo.com	Hapus
22	2021-06-07 13:43	Hafidz Mubarak Ahmad	Antara (Online)	wisataerpa@gmail.com	Hapus
23	2021-06-07 11:15	Mohamad Irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohurfan1926@gmail.com	Hapus
24	2021-06-03 11:20	Edwin Armand Sari	Cnn Indonesia (Elektronik)	amandsari@gmail.com	Hapus
25	2021-06-03 11:19	Jimmy	Cnn Indonesia tv (Elektronik)	jimmysiang17@gmail.com	Hapus
26	2021-06-03 11:13	Indrianto Eko Suwarso	Antara foto (Online)	indrianto.suwarso69@gmail.com	Hapus
27	2021-06-03 09:46	Adam Dwi	Media Indonesia (Cetak)	a_ditra@yahoo.com	Hapus
28	2021-06-02 10:45	Susanto	Media Indonesia (Cetak)	santo.susanto20@gmail.com	Hapus
29	2021-05-31 14:49	Dipo Andamuharom	RCTI (Elektronik)	dooandmuharom@gmail.com	Hapus
30	2021-05-31	Angga Yosua	NEWS TV (Elektronik)	anggayosua93@gmail.com	Hapus



select id, nama, nama_kem, to_char(to_date('yyy-MM-dd') as tgl, 'to_char(to_date('PG4 M')) as wkt, media, nama_media, email from (,nama where jess = 2 and hupas = 0 and id_sertakan is not null order by to_date('PG4 M'))

- [DASHBOARD](#)
- [DASHBOARD](#)
- [PERSEDANGAN](#)
- [PUBLIKASI](#)
- [KEHLIMASAN](#)
- [KERJASAMA](#)
- [INTERAKSI MASYARAKAT](#)
- [WARTAWAN](#)

[Kerjasama](#)

Pencarian

[CARI](#)

Tanggal s/d

No	Tanggal Kunjungan	Nama	Media	Email	Aksi
1	2021-06-17 11:25	Ivan Januari	Metro tv (Elektronik)	januari.ivan@gmail.com	Hapus
2	2021-06-17 11:04	Gema Tanjung	Metro TV (Elektronik)	gemaarinda@gmail.com	Hapus
3	2021-06-17 10:15	Adam Dwi	Media indonesia (Cetak)	a_dtra@yahoo.com	Hapus
4	2021-06-17 10:13	Jessica areta koroh	Radio Elshinta (Elektronik)	chikakoroh@gmail.com	Hapus
5	2021-06-16 11:56	Mohamad irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohufan1926@gmail.com	Hapus
6	2021-06-15 12:06	Denny Marsales	Karya Jurnalis & Buser Bhayabgkara (Online)	michael.yusuf82@gmail.com	Hapus
7	2021-06-15 12:05	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
8	2021-06-15 12:05	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
9	2021-06-15 12:05	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
10	2021-06-15 12:04	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
11	2021-06-15 12:04	Hotben	Gamediapost.com (Online)	gamediapost21@gmail.com	Hapus
12	2021-06-15 11:56	Emawinarti	Newsbisnis.id (Online)	winatpru@gmail.com	Hapus
13	2021-06-15 11:46	Luky auryani zaenal	Gelombangberita.com (Online)	lunlucky321@gmail.com	Hapus
14	2021-06-15 11:44	Irwani Hasholan Semamata	MediaPatriot.co.id (Online)	irwan.mediapatriot@gmail.com	Hapus
15	2021-06-15 11:42	Lucky indrawan	indiatgkorIndonesia.com (Online)	luckyindawan892@gmail.com	Hapus
16	2021-06-15 11:41	Supriyanto	Kompasindo.net (Online)	andreasupriyanto7@gmail.com	Hapus
17	2021-06-15 11:07	Adam Dwi	Media indonesia (Cetak)	a_dtra@yahoo.com	Hapus
18	2021-06-14 11:14	Mohamad irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohufan1926@gmail.com	Hapus
19	2021-06-10 10:30	Sigdm Kurniawan	LKBN Antara (Online)	sigdmaneh@gmail.com	Hapus
20	2021-06-09 13:45	Mohamad irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohufan1926@gmail.com	Hapus
21	2021-06-08 11:27	Adam Dwi	Media Indonesia (Cetak)	a_dtra@yahoo.com	Hapus
22	2021-06-07 13:43	Heftiz Mubarak Ahmad	Antara (Online)	watazoera@gmail.com	Hapus
23	2021-06-07 11:15	Mohamad irfan	Media Indonesia (Cetak)	mohufan1926@gmail.com	Hapus
24	2021-06-03 11:20	Edwin Armand Sari	Cnn Indonesia (Elektronik)	armandsari@gmail.com	Hapus
25	2021-06-03 11:19	Jiminy	Cnn Indonesia tv (Elektronik)	jimmysiang17@gmail.com	Hapus
26	2021-06-03 11:13	Indrianto Eko Suworo	Antara foto (Online)	indrianto.suwarso69@gmail.com	Hapus
27	2021-06-03 09:46	Adam Dwi	Media Indonesia (Cetak)	a_dtra@yahoo.com	Hapus
28	2021-06-02 10:45	Susanto	Media Indonesia (Cetak)	santo.susanto20@gmail.com	Hapus
29	2021-05-31 14:49	Dipo Andimuharom	RCTI (Elektronik)	dooandimuharom@gmail.com	Hapus
30	2021-05-31	Angga Yosua	INews TV (Elektronik)	anggayosua99@gmail.com	Hapus



- DASHBOARD
- DASHBOARD
- PERSOANGAN
- PUBLIKASI
- KEHIMASAN
- KERJASAMA
- INTERAKSI MASYARAKAT
- WARTAWAN

Kerjasama

Pencarian

Keyword

Cari

CONVERT ENGL

No	Tanggal	Foto	Identitas Diri	ID Pers/Surat Tugas
1	2020-12-21		Nama : Wilbrodus Kau Suci NIK : 3371041012890003 Handphone : 082117516873 Email : kausunwilbrodus@gmail.com Jenis Media : Online Nama Media : VIVA.co.id	
2	2021-01-05		Nama : Wawan Hadi Prabowo NIK : 3674031505790005 Handphone : 0817257137 Email : wawanhadiprabowo@kompas.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Kompas	
3	2021-01-05		Nama : Heru Sri Kumoro NIK : 3374022602800007 Handphone : 08122605940 Email : heru.kumoro@kompas.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Kompas	
4	2021-01-11		Nama : Miswar Nasution NIK : 3174091808670003 Handphone : 081219672672 Email : miswarnasution8@gmail.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Sumatera Tenggara Pos	
5	2021-01-19		Nama : Yusriz Zata Lili NIK : 3523164405940001 Handphone : 082121940352 Email : yusrizzata@gmail.com Jenis Media : Elektronik Nama Media : Metro TV	
6	2021-01-19		Nama : Mohammad K. Anfn NIK : 3173012508930004 Handphone : 087877417767 Email : koinul.anfn@metrotvnews.com Jenis Media : Elektronik Nama Media : METRO TV	
7	2021-01-21		Nama : Indriyani Astuti NIK : 3171046606910001 Handphone : 087883374839 Email : indriyani.26091@gmail.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Media Indonesia	
8	2021-01-21		Nama : Sabar Lallahu NIK : 8171022310850008	



DASHBOARD

DASHBOARD

PERSEDANGAN

PUBLIKASI

KEHUMASAN

KERJASAMA

INTERAKSI MASYARAKAT

WARTAWAN

Kerjasama

Pencarian

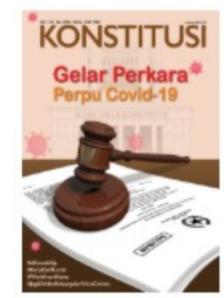
Keyword

Cari

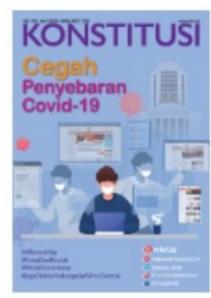
CONVERT EXCEL

No	Tanggal	Foto	Identitas Diri	ID Pers/Surat Tugas
1	2020-12-21		Nama : Wilbrodus Kau Surti NIK : 3371041612890003 Handphone : 082117516873 Email : kausunwilbrodus@gmail.com Jenis Media : Online Nama Media : VIVA.co.id	
2	2021-01-05		Nama : Wawan Hadi Prabowo NIK : 3674031505790005 Handphone : 0817257137 Email : wawanhadiprabowo@kompas.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Kompas	
3	2021-01-05		Nama : Heru Sri Kumoro NIK : 3374022602800007 Handphone : 08122605940 Email : heru.kumoro@kompas.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Kompas	
4	2021-01-11		Nama : Miswar Nasution NIK : 3174091808670003 Handphone : 081219672672 Email : miswarnasution88@gmail.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Sumatera Tenggara Pos	
5	2021-01-10		Nama : Yusrizata Lini NIK : 3523164405940001 Handphone : 082121940352 Email : yusrizata@gmail.com Jenis Media : Elektronik Nama Media : Metro TV	
6	2021-01-19		Nama : Mohammad K. Arifin NIK : 3173012508930004 Handphone : 087877417767 Email : korul.arifin@metrotvnews.com Jenis Media : Elektronik Nama Media : METRO TV	
7	2021-01-21		Nama : Indriyani Astuti NIK : 3171046606910001 Handphone : 087883374830 Email : indriyani.26691@gmail.com Jenis Media : Cetak Nama Media : Media Indonesia	
8	2021-01-21		Nama : Sabri Laluhi NIK : 8171022510850008	

- ARTIKEL
- PENGHARGAAN



159 Mei 2020
Di Unduh : 378
File Pendukung : [Klik Disini](#)
Flip Book : [Flip Book](#)



158 April 2020
Di Unduh : 430
File Pendukung : [Klik Disini](#)



157 Maret 2020
Di Unduh : 1516
File Pendukung : [Klik Disini](#)



156 Februari 2020
Di Unduh : 1078
File Pendukung : [Klik Disini](#)



155 Januari 2020
Di Unduh : 1375
File Pendukung : [Klik Disini](#)



154 Desember 2019
Di Unduh : 1886
File Pendukung : [Klik Disini](#)

PUBLIKASI

- LAPORAN TAHUNAN
- MAJALAH KONSTITUSI
- INFO BUKU KONPRESS
- NASKAH KONPREHENSIF
- HASIL PENELITIAN
- JURNAL
- CALL OF PAPERS
- PROCEEDING
- ARTIKEL
- PENGHARGAAN



[BERANDA](#) > [INFORMASI ADMINISTRASI](#) > [MAJALAH KONSTITUSI](#)

MAJALAH KONSTITUSI



158 April 2020

Di Unduh : 41
File Pendukung : [Klik Disini](#)



157 Maret 2020

Di Unduh : 663
File Pendukung : [Klik Disini](#)



156 Februari 2020

Di Unduh : 593
File Pendukung : [Klik Disini](#)



155 Januari 2020

Di Unduh : 845
File Pendukung : [Klik Disini](#)

DAFTAR ISI



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **10**
- KILAS PERKARA **22**
- BINCANG-BINCANG **28**
- IKHTISAR PUTUSAN **32**
- RISRET KONSTITUSI **36**
- CAKRAWALA **48**
- KHAZANAH **54**
- RISALAH AMANDEMEN **60**
- JEJAK KONSTITUSI **62**
- TELAAH **64**
- RUANG KONSTITUSI **68**

16 LAPORAN UTAMA

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PERPU "COVID-19"

Di tengah pandemi Corona Virus Diseases 19 (Covid-19), Pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No.1/2020) pada 31 Maret 2020 silam. Perpu tersebut diterbitkan dengan dasar adanya implikasi pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap sistem keuangan negara. Akan tetapi, sejumlah masyarakat ramai-ramai mengugat konstitusionalitas Perpu tersebut ke MK. Masalah konstitusionalitas apakah yang termuat dalam Perpu tersebut?

24 KILAS PERKARA



DITUDUH MENCURI, KOLEKTOR INTERNAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUGAT UU JAMINAN FIDUSIA

38 AKSI



MANAHAN MP SITOMPUL, KEMBALI LAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI

52 RESENSI



VOXPOP

APRESIASI SIDANG MK MEMANFAATKAN TEKNOLO

Saya mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menyelenggarakan pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan meski Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) masih merambat di tengah masyarakat. Selain itu, MK juga telah memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan persidangan. Oleh karena itu, dalam hal pengajuan permohonan beberapa perkara terakhir yang diterima oleh MK juga telah diajukan secara online. Karena saya melihat MK telah memanfaatkan teknologi video conference dengan para pihak yang berperkara. Saya berharap dengan situasi pandemi penyebaran Covid-19 saat ini, MK tetap bisa menggelar sidang dengan memanfaatkan teknologi canggih agar persidangan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

*Aditya Purnomo
Surabaya*

SIDANG MK SECARA ONLINE

Saya melihat Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang secara daring (online) khusus untuk perkara-perkara penting yang tidak mengharuskan Pemohon hadir dalam ruang persidangan untuk mencegah penularan wabah Covid-19. Karena sejalan ini MK telah melaksanakan persidangan bahkan putusan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu kesiapan majelis hakim ketika hadir dalam ruang sidang dan melakukan persidangan, ini menunjukkan keseriusan MK dalam melaksanakan tugasnya. Semoga yang telah dilakukan oleh MK telah diwujudkan secara matang agar memenuhi hukum acara dan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Saya berharap semoga sidang online yang telah digelar oleh MK sejauh ini bisa konsisten dan terselenggara dengan baik hingga sidang penguapan putusan.

*Aina Lutfiyanti
Bekasi*

KONSTITUSI MAYA

... Jawab ... Agenda ... Info Lain ...

... Larian COVID-19 ...

... Presiden Jokowi ...

... ANAN COVID-19 ...

... Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni ... adalah kepala pelaksana gugus tugas ini, dan Kepala dewan pengarah. Dalam melaksanakan kepala dewan pengarah. Dalam melaksanakan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berperan sebagai sekretariat gugus tugas ini dibantu oleh sebuah sekretariat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni ... Pendanaan untuk kegiatan gugus tugas ini dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

... itus jejaring gugus tugas ini memberikan berbagai Saasi tentang COVID-19 antara lain jumlah, peta dan riwayat sebaran kasus; berbagai berita berbagai protokol; materi edukasi dan tanya-jawab COVID-19; agenda gugus tugas dan BNPB; regulasi, tim pakar, dan daftar rujukan rumah sakit; serta buster, yaitu acuan mengenai kebenaran informasi beredar di masyarakat. ■

YUNAR WIDHASTUTI



#MengawalKonstitusi
#IndonesiaMaju

BERSAMA
#MengawalKonstitusi
NEGERI

 www.mkri.id   

Verified



Mahkamah Konstitusi RI ✓

86.4K subscribers

SUBSCRIBE

HOME

VIDEOS

PLAYLISTS

COMMUNITY

CHANNELS

ABOUT





mahkamahkonstitusi 

Edit Profile



1,859 posts

130k followers

51 following

Mahkamah Konstitusi

Akun Instagram Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dikelola oleh Biro Humas dan Protokol. [#MengawalKonstitusi](#) [#salaMKonstitusi](#)

www.mkri.id



officialMKRI 
officialMKRI 
mahkamahkonstitusi 
Mahkamah Konstitusi RI 

[Edit profile](#)

Mahkamah Konstitusi

@officialMKRI

Akun T
Humas
Transla



ia Dikelola oleh Biro
, dan Putusan.

Account information

This account is verified because it's notable in government, news, entertainment, or another designated category. [Learn more](#)

h 2012

118 Fo

Tweets

Tweets & replies

Media

Likes





**Anis Khairiyah**

Active 12m ago



Mentioned you in their story

JUN 22, 9:22 AM

Selamat pagi min, izin bertanya...
Untuk pendaftaran lomba infografis,
yang kolom bagian ide pokok di isi
mengenai apa ya?terimakasih



Halo #Courtizen, terkait kolom
tersebut dapat diisi dengan latar
belakang atau alasan kenapa memilih
putusan tersebut ya.

Untuk link preview dan asli itu link
putusannya kak?



TUE 3:09 PM

link priview dan link asli adalah link
yang berisi dokumen preview dan
dokumen asli infografis ya

TUE 4:21 PM



Baik kak Terimakasih

Tap and hold to react



Message...



**Kishan**

marccsel



Mohon untuk segera mengirimkan data diri, alamat lengkap, dan no. handphone. Terima kasih

JUN 14, 3:50 PM

Nama : Marcelino Ceasar Kishan
Alamat : Puri Satya Permai, no. 40A,
blok 2, Jalan Kemiri Raya, Kec.
Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa
Tengah, Kode Pos 50711
No HP:
0895802162209/085696279417



Tap and hold to react

JUN 15, 12:19 PM

Terima kasih #Courtizen, silahkan menunggu proses pengiriman hadiah. Mohon untuk mengkonfirmasi apabila telah menerima hadiahnya.
#salaMKonstitusi

JUN 19, 9:56 PM

Hadiahnya udah diterima, thank u MK!



Message...



**M. Fariz Amrullah**

mfarizamr



Assalamualaikum. Haloo admin konstitusi. Perkenalkan saya M. Fariz Amrullah, Mahasiswa akhir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya izin bertanya untuk keperluan penelitian, untuk mengetahui daerah daerah mana saja yang mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2020 lalu bisa dilihat dimana ya?

Barangkali berkenan admin untuk menjawab. Soalnya saya cari di media dan di kanal MK engga ketemu, rata-rata hanya menyebut jumlah gugatan yang masuk tapi daerah daerahnya engga disebutkan secara rinci daerah mana saja. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya

MAY 29, 11:15 AM

Wa'alaikumsalam.

Halo #Courtizen, terkait hal tersebut, silakan cek link berikut ya untuk detail daerahnya. Terima kasih.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>



Message...



**M. Fariz Amrullah**

mfarizamr



dilihat dimana ya?

Barangkali berkenan admin untuk menjawab. Soalnya saya cari di media dan di kanal MK engga ketemu, rata-rata hanya menyebut jumlah gugatan yang masuk tapi daerah daerahnya engga disebutkan secara rinci daerah mana saja. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya

MAY 29, 11:15 AM

Wa'alaikumsalam.

Halo #Courtizen, terkait hal tersebut, silakan cek link berikut ya untuk detail daerahnya. Terima kasih.



<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>

PILKADA 2020 | MKRI

<https://www.mkri.id/index.php...>

MAY 29, 4:43 PM

Terima kasih admin, datanya lengkap

Tap and hold to react



Message...





EFENDI SEMBIRING

efendi_366



Gimana min, buat dapet majalahnya

MAY 19, 11:06 AM



https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_197_1.%20Edisi%20April%20%202021%20SIKD.pdf

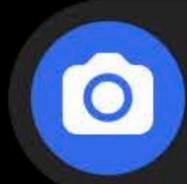
berikut ya

MAY 19, 5:23 PM



Terimakasih min

Tap and hold to react



Message...





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 206/HP.01.02/04/2021
Hal : Rapat Rencana Konten Media Sosial

30 April 2021

Yth.

Peserta Rapat
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan media sosial, setiap bulannya Tim Media Sosial MK menyusun perencanaan kalender konten media sosial, berkenaan dengan hal tersebut diperlukan koordinasi antarpelaksana agar pelaksanaan kegiatan dapat ditingkatkan. Mengingat keterlibatan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pengelolaan dimaksud, kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri rapat pembahasan pada:

Hari, tanggal : Senin, 3 Mei 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 11 Gedung I MK
Pimpinan Rapat : Sekretaris Jenderal MK

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**



Digital Signature
mk160582792210430042929

Lampiran Undangan Rapat

Nomor : 206/HP.01.02/04/2021
Tanggal : 30 April 2021

Daftar Peserta Rapat

1. Heru Setiawan
2. Fajar Laksono
3. Mutia Fria Darsini
4. Andhini Sayu Fauzia
5. Fitri Yuliana
6. Tiara Agustina
7. Muhammad Halim
8. Raisa Ayuditha
9. Ilham Erwin
10. Zahra Marida



Kalender Content Mei 2021

1 Mei 2021				
	Tanggal	Sidang	Nonsidang	Tambahan
Sabtu	01/05/21		Libur	Hari Buruh Internasional + Twibbon
Minggu	02/05/21		Libur	Hari Pendidikan Nasional + Twibbon
3-8 Mei 2021				
		Sidang	Nonsidang	Tambahan
Senin	03/05/21		Majalah Konstitusi (Laput)	
Selasa	04/05/21		Kompilasi Putusan Landmark tentang UU Pendidikan dari 2003-2020	
Rabu	05/05/21		Tahukah Anda : Pemohon Terbanyak (UU Ciptaker)	
Kamis	06/05/21		QnA #TatapMK Vol. 8 dgn Andi Hakim PLTSDMO ttg Magang	
Jumat	07/05/21		Kamus hukum : Rechtvacuum	
Sabtu	08/05/21		Quote: Organ-organ negara yang mendapat kewenangan dari konstitusi harus tunduk dan mendasarkan segala tindakannya pada aturan konstitusi - Maruarar Siahaan	
10-15 Mei 2021				
		Sidang	Nonsidang	Tambahan
Senin	10/05/21		Hi MK! : Kongres Kedua AACC	
Selasa	11/05/21		Putusan Landmark tentang UU Perkawinan	
Rabu	12/05/21		Libur Cuti Bersama	
Kamis	13/05/21		Libur	Hari Raya Idulfitri 1442 H dan Kenaikan Isa Almasih + Twibbon
Jumat	14/05/21		Libur	
Sabtu	15/05/21		Quote: Rasa keadilan merupakan buah pekerjaan kerohanian dari seorang manusia - Wirjono Prodjodikoro	
17-22 Mei 2021				
		Sidang	Nonsidang	Tambahan
Senin	17/05/21		Pustaka Klasik : Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945 (MaKon April 2011)	Hari Buku Nasional + Twibbon
Selasa	18/05/21		Infografis : Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Hakim Konstitusi (PMK 02/PMK/2003)	
Rabu	19/05/21		Tahukah Anda : Profil Hakim Wakil Ketua	
Kamis	20/05/21		Miskuis : Susun Kata	Hari Kebangkitan Nasional + Twibbon
Jumat	21/05/21		Kamus hukum : Vide	
Sabtu	22/05/21		Quote: Orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun, studi hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain dalam ilmu sosial. Lawrence M. Friedman - Profesor Hukum Amerika	
24-29 Mei 2021				
		Sidang	Nonsidang	Tambahan
Senin	24/05/21		Hi MK! : MoU dengan Instansi Pendidikan	
Selasa	25/05/21		Konten KIP Laporan Tahunan	
Rabu	26/05/21		Libur	Hari Raya Waisak 2565 + Twibbon
Kamis	27/05/21		Miskuis : Susun Gambar	

Jumat	28/05/21		Videomotion : Perbedaan Gugatan dan Permohonan cari sumber dari buku	
Sabtu	29/05/21		Quote: Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke! - Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia periode 1945–1967	
31 Mei 2021				
		Sidang	Nonsidang	Tambahan
Senin	31/05/21		Pustaka Klasik : Pengantar Tata Hukum Di Indonesia (MaKon Februari 2011)	

*Sidang lainnya dan agenda pimpinan di FB dan Twitter

*Untuk Twibbon konfirmasi dulu ke Pak Heru

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
NOMOR 134//HP.01.02/04/2021**

Yth. : Kepala Biro Humas dan Protokol
Dari : Kepala Bagian Humas dan KSDN
Perihal : Penyampaian Kalender *Content* Mei Media Sosial MK
Tanggal : 29 April 2021

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Panduan Kerja Teknis Media Sosial, perencanaan konten media sosial (Kalender Konten) harus disusun pada setiap pekan akhir bulan berjalan. Untuk itu, kami sampaikan Perencanaan Editorial media sosial berupa Kalender Konten untuk bulan Mei 2021. Kalender Konten ini berisi rencana materi konten media sosial yang akan dibuat dan diunggah ke seluruh platform media sosial Mahkamah Konstitusi. Kalender Konten juga menjadi panduan bagi Tim Pengelola Media Sosial terutama bagi Spesialis Media Sosial dalam pembuatan desain konten selama bulan Mei 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon arahan Bapak.

Sekiranya Bapak tidak berpendapat lain, mohon Bapak berkenan memberikan persetujuan pada konsep Kalender Konten dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas arahan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Humas dan KSDN,
Fajar Laksono Suroso



Digital Signature
mk160582792210429014636



mahkamahkonstitusi 7h



#Mengawal
Konstitusi

LIVE SIDANG

**PENGUCAPAN
PUTUSAN/
KETETAPAN**

29 Juni 2021

disiarkan langsung di:

+ Youtube Mahkamah konstitusi RI



See More



MAHKAMAH KONSTITUSI
Posts

mahkamahkonstitusi

# Mengawal
Konstitusi

Tatap MK

Tanya-Tanya Seputar MK
vol. 9

@m.ht.r

“

Sebagai mahasiswa hukum, langkah apa yang perlu saya lakukan agar menjadi anggota MK?

”

“

Maksudnya pengen menjadi Hakim Konstitusi atau Pegawai MK? Karena keduanya mempunyai syarat yang berbeda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau Hakim Konstitusi antara lain syarat akademiknya harus Doktor dengan latar Sarjana Hukum dan berusia minimal 55 tahun. Masih jauh itu. Tapi kalau Pegawai MK, tentu selepas selesai kuliah bisalah, sepanjang ada kesempatan dan formasi.

Sebagai mahasiswa hukum, langkah Saudara harus belajar dengan baik, dapat sebenar-benarnya ilmu, gemar melakukan tradisi ilmiah, bukan hanya di bangku kelas, tetapi melibatkan diri dalam kegiatan atau organisasi yang menggembleng pengalaman, lalu lulus sebagai Sarjana Hukum dengan IPK bagus. Baru setelah itu dapat ikut andil dan ambil kesempatan (sekiranya ada pasti diumumkan secara terbuka) untuk berkiprah dengan bekerja di MK.

”

**Fajar Laksono Suroso**Kepala Bagian Humas dan
Kerja Sama Dalam Negeri MKRI

View Insights

Promote





Comments



amoysaman14 Tapi yang jadi pertanyaan hari ini kenapa gak ada siaran langsung dan kenapa tiba" link yang ada di snap dihapus



17w Reply



mahkamahkonstitusi @amoysaman14

Halo Courtizen,

Pada persidangan lanjutan #PHPKada2020 dengan agenda Pembuktian (22 Feb s.d. 4 Maret 2021) tidak disiarkan secara langsung karena pada saat pemeriksaan saksi atau ahli salah satu pihak, saksi atau ahli pihak lain tidak diperbolehkan menyaksikan persidangan. Sidang akan tetap diunggah pada Youtube MK setelah sidang selesai. Terima kasih #salaMKonstitusi



17w Reply



amoysaman14 @mahkamahkonstitusi Ok baik,.. terimakasih atas penjelasannya 🙌 .. sukses selalu MK , GBU ..



17w 1 like Reply

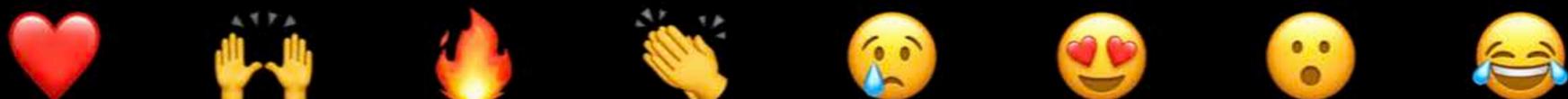
— Hide replies



muhammadfarhannaufalrri2045gt Mantap bagus kapan-kapan aku ingin belajar tentang Hukum UUD 1945



17w Reply



Add a comment as mahkamahkonstitu...



Comments



ziyah_zee Ini per tim atau individu yah?

2w 5 likes Reply



mahkamahkonstitusi @ziyah_zee Halo #Courtizen, perlombaan nya dapat diikuti sebagai tim atau individu. Ayo ikutan! 😊

1w 1 like Reply



— View 1 more reply



kamalabdl putusan tahun berapa aja min?

1w 1 like Reply



mahkamahkonstitusi @kamalabdl Halo #Courtizen, terkait hal tersebut tidak ada batasan ya, jadi bisa pilih putusan MK yang mana saja dari sejak MK berdiri hingga sekarang. Ayo ikutan! 😊

1w 1 like Reply



buibu.kompleks ada batasan periode putusan MK nya gak min?

1w Reply

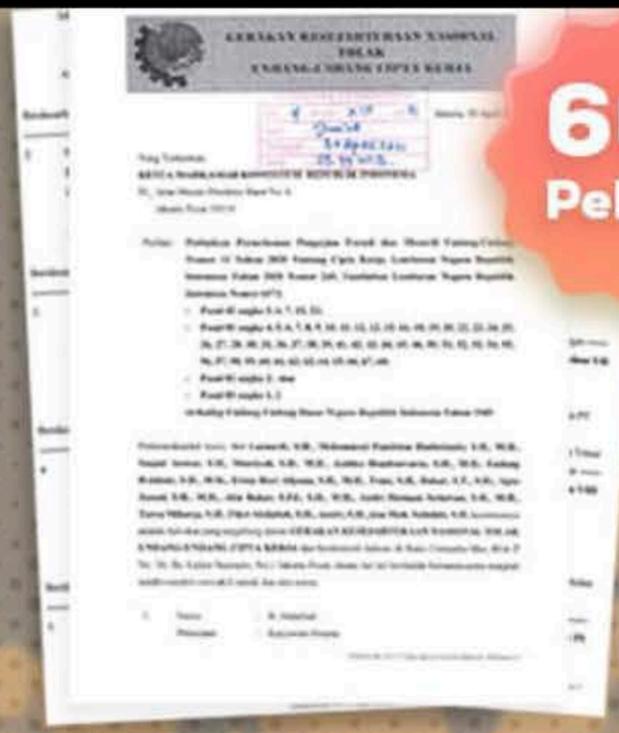


mahkamahkonstitusi @rhyophelia Halo #Courtizen, terkait hal tersebut tidak ada batasan ya, jadi bisa pilih putusan MK yang mana saja dari sejak MK berdiri hingga sekarang. Ayo ikutan! 😊



Add a comment as mahkamahkonstitu...

Posts

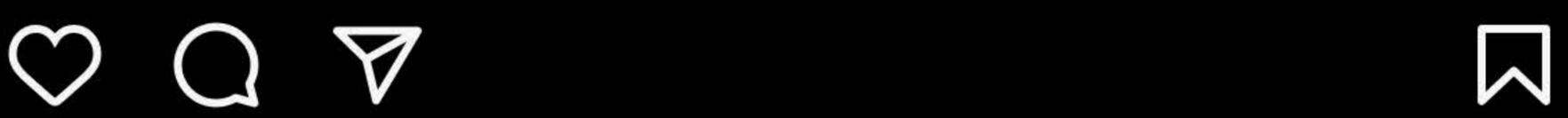


661
Pekerja

tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional Tolak Undang-Undang Cipta Kerja merupakan pemohon perorangan yang sebagian besar dengan latar belakang Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan serta karyawan swasta dari berbagai perusahaan.

View Insights

Promote



451 likes

mahkamahkonstitusi Tahukah #Courtizen? Pertama kali dalam sejarah MK, terdapat 661 orang pemohon yang terdaftar pada satu permohonan pengujian undang-undang! Undang-undang apa ya yang dipersoalkan? Cek di konten #TahukahAnda kali ini yuk! 😊

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

View all 5 comments

ananda_kharisma_auliya Ngechecknya dimna min? @mahkamahkonstitusi

mahkamahkonstitusi @ananda_kharisma_auliya #Courtizen dapat cek di menu perkara pada laman MK ya 😊

# Mengawal
Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

PHPKada :

1. No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 Kab. Yalimo
Amar Putusan: **Dikabulkan Sebagian
(Pemungutan Suara Ulang)**

PUU :

2. No. 9/PUU-XIX/2021
UU Cipta Kerja
Putusan: **Ditarik Kembali**
3. No. 13/PUU-XIX/2021
UU Pornografi
Amar Putusan: **Ditarik Kembali**
4. No. 109/PUU-XVIII/2020
UU Cipta Kerja
Amar Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
5. No. 1/PUU-XIX/2021
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Amar Putusan: **Ditolak Seluruhnya**
6. No. 8/PUU-XIX/2021
UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
Amar Putusan: **Ditolak Seluruhnya**

SWIPE
UP

See More



# Mengawal
Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

7. No. 12/PUU-XIX/2021
UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Amar Putusan: **Ditolak Seluruhnya**
8. No. 14/PUU-XIX/2021
UU Keekarantinaan Kesehatan
Amar Putusan: **Ditolak Seluruhnya**
9. No. 109/PUU-XVIII/2020
UU Cipta Kerja
Amar Putusan: **Tidak Dapat Diterima**
10. No. 15/PUU-XIX/2021
UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
Amar Putusan: **Dikabulkan Seluruhnya**

[See More](#)



PODCAST

SUPREMASI

Mahkamah Konstitusi RI

FOLLOWING



All Episodes

Newest to Oldest ▼

About

Supremasi (Supaya Presisi Memahami Konstitusi) merupakan media dalam menyampaikan, memberikan pemahaman, dan menyebarkan informasi kepada #Courtizen mengenai isu-isu konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

[show less](#)



SUPREMASI.07 ANTARA KITAB SUCI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI

SUPREMASI Eps. 7 ANTARA KITAB SUCI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI bersama Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ma. Apu Guru Besar UIN Jakarta ...



Jun 1 · 45 min



SUPREMASI.06 TOLERANSI, BENARKAH KEBERAGAMAN ITU INDAH?

TOLERANSI, BENARKAH KEBERAGAMAN ITU INDAH? bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2003-2008 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,...



Mar 27 · 54 mins left

10	Sidang	Pe
15	Un	ter
	Tir	UL

Input Kegiatan

Waktu Kegiatan

Status Kegiatan
Internal

Nama Pimpinan
Pilih

Kegiatan

Lokasi
DALAM KANTOR

Keterangan

Batal Simpan

- Annisa Lestari
- Konstitusi
- Siaran Pers :** Andhini Sayu Fauzia
 - Fotografer :** Iffa Dwi Septian
 - Kameramen :** Hendy Prasetya
 - Editor Video :** M. Nur
 - Penulis :** Sri Pujianti
 - Editor Berita :** Lulu Anjarsari
 - Reporter :** Ilham Wiryadi
 - R. Kontrol :** Nur Khafid
 - R. Kontrol :** M. Hidayat S.
 - R. Kontrol :** Hendra Kusuma
 - Penerjemah Bhs. Inggris :** Yuniar Widiastuti
 - Media Sosial :** Ilham Erwin
 - Media Sosial :** Zahra Marida Putri
- Update Petugas

2021-06-29

PDF CSV

No	Jenis						
1	Non Sidang	Ce da					
2	Non Sidang	Kegiatan Penyerahan LHP Laporan Keuangan MK TA 2020 oleh Anggota III BPK	Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 09:00 WIB	Aula lantai Dasar MK	Anwar Usman	<ul style="list-style-type: none">Fotografer : Ifa Dwi SeptianKameramen : HamdiKameramen : YuwandiKameramen : Yok BanuEditor Video : YuwandiPenulis : Utami ArgawatiEditor Berita : Lulu AnjarsariReporter : Bayu WicaksonoPenerjemah Bhs. Inggris :	<p>Hapus Kegiatan</p> <p>Update Petugas</p>

Petugas Liputan

Nama *

Pilih Pegawai

Sebagai *

Fotografer

Hapus Simpan

Jadwal Liputan

Waktu	Tempat	Judul	Narsum	Siaran Pers	Fotografer & Kameramen	Editor Video	Penulis & Editor Berita	Reporter	R. Kontrol	Penerjemah Bhs. Inggris	Penyelaras Bhs. Inggris	Media Sosial
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 07:00 WIB	Ruang Rapat Lt. 11	Cek Jaringan untuk Acara HUT POLRI dan Gladi Kotor	M. Guntur Hamzah									
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 09:00 WIB	Aula lantai Dasar MK	Kegiatan Penyerahan LHP Laporan Keuangan MK TA 2020 oleh Anggota III BPK	Anwar Usman		Ifa Dwi SeptianHamdiYuwandiYok Banu	Yuwandi	Utami ArgawatiLulu Anjarsari	Bayu Wicaksono		Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 9/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Lambang Tri Sulistyio	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	Yuwandi	Nano Tresna ArfanaNur Rosikin	Ilham Wiryadi	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Andhini Sayu Fauzia	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	M. Nur	Sri PujiantiLulu Anjarsari	Panji Erawan	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Muhammad Halim	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	Yuwandi	Nano Tresna ArfanaNur Rosikin	Ilham Wiryadi	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Annisa Lestari	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	Yuwandi	Sri PujiantiLulu Anjarsari	Ilham Wiryadi	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Lambang Tri Sulistyio	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	Yuwandi	Nano Tresna ArfanaNur Rosikin	Panji Erawan	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Muhammad Halim	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	Yuwandi	Nano Tresna ArfanaNur Rosikin	Panji Erawan	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Annisa Lestari	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	M. Nur	Sri PujiantiLulu Anjarsari	Bayu Wicaksono	M. Hidayat S.Nur KhafidHendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Andhini Sayu Fauzia	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	M. Nur	Sri PujiantiLulu Anjarsari	Ilham Wiryadi	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 19/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Hakim Konstitusi	Fitri Yuliana	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	M. Nur	Nano Tresna ArfanaNur Rosikin	Panji Erawan	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri
Selasa, 29 Juni 2021, Pkl: 10:00 WIB	Gd. MKRI 1Lantai 2	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 145/	Hakim Konstitusi	Muhammad Halim	Ifa Dwi SeptianHendy Prasetya	Yuwandi	Sri PujiantiLulu Anjarsari	Bayu Wicaksono	Nur KhafidM. Hidayat S.Hendra Kusuma	Yuniar Widiastuti		Ilham ErwinZahra Marida Putri



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA KESEPAHAMAN

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN DATA LAYANAN PUBLIK PADA WEB
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DAN WEB MAHKAMAH
KONSTITUSI SERTA PENINGKATAN BUDAYA SADAR KONSTITUSI**

Nomor 13/Kemensetneg/Ses/04/2021

Nomor 31/PK/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **25**, bulan **Mei**, tahun **2021**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Setya Utama**, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, berkedudukan di Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.



- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta itikad baik **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengintegrasian Data Layanan Publik pada Web Kementerian Sekretariat Negara dan Web Mahkamah Konstitusi serta Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pengintegrasian Data Layanan Publik pada Web Kementerian Sekretariat Negara dan Web Mahkamah Konstitusi serta Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.



Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pengintegrasian data dan informasi layanan publik web **PIHAK KEDUA** pada web dan aplikasi **PIHAK KESATU** melalui antarmuka pemrograman aplikasi dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan/peradilan berbasis elektronik, serta guna meningkatkan budaya sadar konstitusi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya pengintegrasian data dan informasi layanan publik web **PIHAK KEDUA** pada web dan aplikasi **PIHAK KESATU** melalui antarmuka pemrograman aplikasi dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan/peradilan berbasis elektronik, serta guna meningkatkan budaya sadar konstitusi.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengintegrasian data dan informasi terkait dokumen layanan publik dalam rangka penanganan perkara di **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundang-undangan di **PIHAK KESATU** yang telah dimuat dalam web instansi **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK KEDUA** menyerahkan salinan putusan kepada **PIHAK PERTAMA** secara elektronik;
- c. Kerja sama pengintegrasian sistem informasi kearsipan;
- d. Penyelenggaraan kerja sama *mini court room*;
- e. Peningkatan budaya sadar konstitusi;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PARA PIHAK menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di web masing-masing.

Pasal 4 **Monitoring Dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.



- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 Tindak Lanjut

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 8 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 9 Penyelesaian Masalah

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 10
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

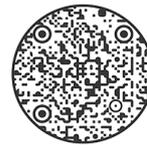
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SETYA UTAMA

PIHAK KEDUA,



M. GUNTUR HAMZAH

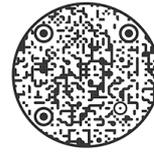
MENGETAHUI:

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



PRATIKNO

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



ANWAR USMAN



Digital Signature

Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE

mou.mkri.id





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 253/ST.SPD/2000/09/2019

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembuatan aplikasi untuk acara Simposium Internasional dan International Expert Meeting, maka perlu menebitkan surat tugas kepada pegawai untuk mendukung kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Nota Dinas 302/2700/TI.01/09/2019 Permohonan Penugasan untuk kegiatan konsinyering pembuatan aplikasi simposium.

Menugaskan :
Kepada

1.	Nor Rosyid	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data
2.	Mazmur Alexander Manik	Pranata Komputer Ahli Pertama
3.	Jeklin Indriani Br. Purba	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama
4.	Muhamad Aussie	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	Ishak Purnama	Programmer
6.	Rudi Kurniawan	Programmer
7.	Raisa Ayuditha	Analisis Berita

Untuk : Melaksanakan tugas untuk pembuatan aplikasi simposium internasional:
Hari / Tanggal : Kamis – Sabtu, 19 – 21 September 2019
Tempat : Fame Hotel Tangerang

Jakarta, 19 September 2019
Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah

Tembusan Yth:

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk62336815190919122617

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

NOTA DINAS
Nomor: 7/2330/TI.05.02/04/2020

Kepada : Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data
Dari : Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerjasama Luar Negeri
Perihal : Permohonan Penambahan Konten Website AACC
Tanggal : 13 April 2020

Dalam rangka pengelolaan website AACC di laman <http://aacc-asia.org/> yang saat ini masih terus dikembangkan, dengan hormat kami mohon bantuan Bapak untuk menugaskan staf IT yang telah ditunjuk untuk mendampingi kami dalam pengelolaan website dimaksud untuk mengatasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum adanya fasilitas hyperlink pada opsi news;
2. Belum adanya opsi document pada saat ingin mengupload dokumen.

Terlampir kami sertakan foto menu yang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Sektap AACC dan
Kerjasama Luar Negeri,
Sri Handayani

Tembusan :

1. Kepala Pusat TIK;
2. Kepala Biro Humas dan Protokol.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 219/2300/TI.05.02/06/2020

Kepada : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala biro Humas dan protokol
Perihal : Permintaan Pendampingan Website AACC
Tanggal : 01 Juni 2020

Dalam rangka pengembangan website AACC di laman <http://aacc-asia.org/>, kami telah mendapat pendampingan dari Pusat TIK dengan dibentuknya tim khusus pendampingan website tersebut. Namun demikian, di lapangan ada beberapa permasalahan yang kami temui, utamanya yang berkaitan dengan keleluasaan para negara anggota AACC untuk memperbarui berita dan informasi institusi mereka, yaitu :

1. Belum adanya fitur edit dan tambah pada kolom Sekretariat dan Event, sehingga tidak bisa mengupload tambahan informasi (contoh: penambahan atau edit informasi untuk data Liaison Officer);
2. Permohonan adanya fitur yang memungkinkan recent video dapat dibuka pada kolom News. Saat ini kolom recent video hanya dapat mencakup 6 video terkini dan apabila kita menginginkan untuk membuka keseluruhan video yang ada, maka kita harus kembali ke menu video;
3. Permohonan penambahan opsi dokumen pada upload dokumen di kolom library, beserta opsi editnya. Saat ini log in Admin yang dipunya oleh MK Korea tidak dapat me-upload dokumen-dokumen mereka pada website AACC, sehingga up load dokumen masih harus melalui master admin yang dipegang oleh kita.

Apabila Bapak tidak berpendapat lain, kami mohon perkenan Bapak agar kami dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Pustik MKRI mengingat penambahan fitur tersebut cukup penting untuk segera direalisasikan.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,

Heru Setiawan



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1 001
Digital Signature
mk-363604074200528094711

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
NOMOR: 191/2300/HP.00/05/2020**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Perkembangan Pengembangan Website MKRI.ID Versi Bahasa Inggris
Tanggal : 06 Mei 2020

Dengan hormat, terkait dengan pengembangan website MKRI.ID dengan versi bahasa inggris yang merupakan kerjasama Biro Humas dan Protokol dengan Pusat TIK, maka dapat kami laporkan tampilan website dimaksud sebagai berikut:

1. Interface Beranda

Beranda di desain simple dan bersih dengan dominan warna putih dan aksent warna merah pada beberapa toolbar. Adapun pada interface beranda, yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

Sisi Kiri: Justices, Link Live Streaming and Video Conference, Library, Court Building, dan Visit The Court,

Sisi Tengah: Latest News

Sisi Kanan: Link Video, Link Situs AACC, Link Case Tracking

Untuk ditindaklanjuti:

- a. *Pengaturan estetik tampilan sisi kanan (Pusat TIK);*
- b. *Penentuan list video apa yang akan dimuat dalam menu video sisi kanan (Pusat TIK);*
- c. *Pengalihbahasaan Menu Visit the Court ke dalam bahasa inggris (oleh Biro HP)*

2. Profile

- History (telah dialihbahasakan)
- Vision and Mission (telah dialihbahasakan).

Untuk ditindaklanjuti: Mohon menyesuaikan dengan Visi dan Misi yang telah disampaikan perbaikannya. (Pusat TIK)

- Standing, Authority and Obligation (telah dialihbahasakan)
- Justices (telah dialihbahasakan).

Untuk ditindaklanjuti: Mohon ditambahkan Hakim Periode Sebelumnya. (Pusat TIK)



- Organizational Structure.

Untuk ditindaklanjuti: Mohon Struktur Organisasi yang telah disampaikan dalam bahasa Inggris dapat diupload. (Pusat TIK)

3. Court

- Case: Untuk ditindaklanjuti: Pengalihbahasaan beberapa menu minor pada Decision (Pemohon, Kuasa Pemohon, Amar Putusan, Tanggal Putusan, dsb)
Catatan: Untuk tahun 2020, tidak akan dilaksanakan kegiatan penerjemahan Decision dan Summary of The Decision.
- E Court.
SIMPEL : -
Case Tracking : -
Court Schedule : Telah dilakukan pembagian tugas data dinamis pada lingkup Bagian Sekta AACC dan Kerjasama Luar Negeri
Court Procedure : Mohon dilakukan penambahan / perbaikan istilah untuk Justices Board Meeting diubah menjadi Deliberation (Pusat TIK)
- Emblem (tanpa catatan)
- Kanal Live Streaming (Tanpa Catatan)

4. International

- Secretariat for The AACC (Tanpa catatan)
- International Relation : Sedang dibangun tampilan bola dunia dengan informasi tentang kerjasama luar negeri MKRI, baik berupa MoU, kunjungan kerja luar negeri maupun kegiatan seminar / konferensi. (Pusat TIK dan Biro HP)

5. Library

- E journal (Tanpa Catatan)
- E Magazine : untuk tahun 2020, hanya dapat dilakukan penerjemahan sampai dengan bulan Februari.
- Research Report : Untuk kedepan perlu untuk dilakukan pengalihbahasaan *research report* (Puslitka)

6. News (Tanpa Catatan)

7. Contact Us

- Map : Kondisi MAP perlu untuk disesuaikan pada alamat gedung MKRI
- Whistleblowing (Menuju tautan website WBS MKRI)



- Visit The Court : Perlu pengalihbahasaan menu visit the court (Biro HP)
- QnA : Perlu diatur kedepannya, perihal penanggung jawab QnA dalam bahasa Inggris.

Demikian dapat kami sampaikan progres pengembangan website english.MKRI.ID. Jika Bapak tidak berpendapat lain, kami akan meneruskan beberapa hal yang perlu kami tindaklanjuti bersama dengan Pusat TIK.

Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Heru Setiawan

Tembusan:

1. Kepala Pusat TIK
2. Kepala Puslitka



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1 001
Digital Signature
mk-1475680308200505093116

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 541/HP.00/06/2020
Hal : Undangan Rapat

16 Juni 2020

Kepada Yth.
Peserta Rapat
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka rapat pembahasan perkembangan pembangunan website MKRI versi Bahasa Inggris, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pembahasan hal dimaksud pada:

Hari, tanggal : Rabu, 17 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Heru Setiawan



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1 001
Digital Signature
[mk1856333273200616092913](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran Undangan Rapat 541/HP.00/06/2020 tanggal 16 Juni 2020

Daftar Peserta Rapat:

1. Sri Handayani
2. Nur Rosyid Ardani
3. Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit
4. R.A. Indah Aprianti
5. Olfiziana Tri Hastuti
6. Tarnoto
7. Luthfi Chakim
8. Wafda Afina Dianatuti
9. Sherly Octaviana Sari
10. Bobi Arianto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor 254/2300/HP.00/06/2020

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Penyampaian Perkembangan Website MKRI versi Bahasa Inggris
Tanggal : 20 Juni 2020

Dengan hormat, sehubungan dengan pengembangan website MKRI versi Bahasa Inggris pada laman www.english.mkri.id, bersama ini kami sampaikan informasi terbaru mengenai tampilan konten website dimaksud sebagaimana terlampir.

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan pada tanggal 17 Juni 2020, kami sampaikan pula beberapa rencana perbaruan konten sebagai berikut :

1. Penambahan submenu pada menu toolbar *Library* dengan urutan:
 - **Constitution (tambahan)** yang berisi terjemahan resmi dari UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - *E-Journal (existing)*.
 - *E-Magazine (existing)*.
 - **Proceeding (tambahan)** yang berisi dokumen *proceeding* kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh MKRI.
2. Penambahan submenu pada menu toolbar *International* dengan urutan:
 - AACC yang otomatis terhubung dengan website www.aacc-asia.org
 - WCCJ yang berisi informasi seputar keanggotaan MKRI dalam Biro WCCJ dan rencana pengajuan diri MKRI sebagai tuan rumah Kongress berikutnya.
 - *Database Activity*
3. Penambahan *shortcut* menu *Constitution* pada halaman depan website.
4. Perubahan judul menu *Visit the Court* menjadi *Get in Touch with Us* dengan diikuti dengan pembuatan email tersendiri untuk mengelola fungsi hubungi MK khusus untuk keperluan menggunakan Bahasa Inggris (international@mkri.id).
5. Penyusunan desain gambar modern dan menarik untuk *slider* pada halaman depan website sebanyak minimal 3 (tiga) gambar.



Lebih lanjut dengan mempertimbangkan pengalaman serta kompetensi pegawai Luthfi Chakim selama masa tugas belajar dan magang pada Sekretariat AACC bidang *Research and Development* di Korea, kami mohon perkenan Bapak Sekjen untuk menugaskan yang bersangkutan membantu Bagian Sektap AACC dan Kerjasama Luar Negeri dalam mengelola website english.mkri.id dan website aacc-asia.org.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas & Protokol,
Heru Setiawan



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1 001
Digital Signature
[mk-1862856369200619033946](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



**The Constitutional Court of the Republic of Indonesia Receives
Commemorative Medal on 25th Anniversary of Kazakhstan's
Constitution**

02 November 2020

Indonesian

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia



- Profile
- Court
- International
- Library
- News
- Contact Us



Indonesia affirms commitment to building brotherhood among the Constitutional Courts of the OIC countries

Delegation of Indonesia, Turkey, and Pakistan gather in Bali, November 2019, to reaffirm that the Constitutional Courts of the OIC (Organization of Islamic Cooperation) countries needs to promote Islamic vision of human rights and democratic law enforcement through a conference under the patronage of Indonesian Constitutional Court.



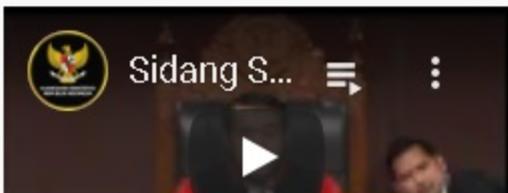
Justices

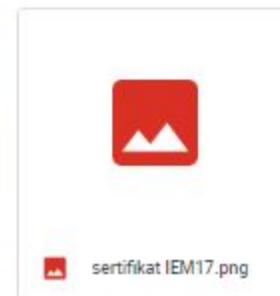
Latest Decision & Hearing



Erdi Dabi Disqualified, Yalimo Regent Election Will Re-Voted Again

Video





Raisa Ayuditha Marsaulina
● Online

- Dashboard
- Setting
- List Peserta
- Approve Peserta
- List Peserta
- Agenda Kegiatan
- Photo
- Report

List Peserta Simposium Internasional

Dashboard > Daftar User

Registrasi Online

Search

No.	Personal Information	Attendance Detail	Barcode	Status	Action
1	PARTICIPANT Name : Ms. Siti Marwiyah Country : Indonesia Organization : Univ. DR. Soetomo Academic Title : Doktor Position : Wakil Rektor 1 Special Dietary Requirements : No Pork,Lainnya :- Email : siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id Mobile : 081216137143 Telephone : 031-5944750 Shirt Size : L	Arrival Date : 2019-11-18 Flight No. : JT 0990 Airlines : Time : 19:45 <hr/> Departure Date : 2019-11-06 Flight No. : GA 0341 Airlines : Time : 09:45		Waiting for Approval	<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Approve</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Delete</div>
2	PARTICIPANT Name : Ms. Hesti Armiwulan Country : Indonesia Organization : Faculty of Law University of Surabaya	Arrival Date : 2000-01-01 Flight No. : Airlines : Time : 00:00		Waiting for Approval	<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Approve</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Delete</div>

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

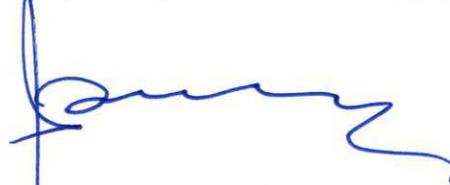
**NOTA DINAS
NOMOR 26/2310/HP.04.04/4/2019**

Yth. : PPK IV
Dari : Kepala Bagian Humas dan KSDN
Perihal : Pengadaan Kegiatan Analisis Pemberitaan, Media Monitoring, dan Social Media
Monitoring *Insight*
Tanggal : 29 April 2019

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pelayanan kehumasan dan evaluasi diseminasi penanganan perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan Protokol akan mengadakan kegiatan **Analisis Pemberitaan Media Monitoring dan Sosial Media Monitoring *Insight*** melalui kerja sama dengan ANTARA DIGIVLA selaku penyedia layanan jasa dimaksud terhitung Mei 2019. Anggaran tersebut akan dibebankan pada kegiatan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK / Diseminasi Putusan MK (3373.002.051B).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan Bapak. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Humas dan KSDN,



Fajar Laksono
NIP. 19791226 200801 1 008

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
1	12-05-2019 21:26:51	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Disposisi (Biasa)	-ACC Saran. Mohon diproses sesuai ketentuan, prosedur, dan AUPB. Mohon layout aplikasi menggunakan nama "Media Monitoring MK". Tahun 2019 disewa terlebih dahulu, nanti tahun 2020 dibeli lepas dan lengkap dgn source dan kunci program shg kita tidak tersandra oleh aplikasi tsb.
2	07-05-2019 11:41:41	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tembusan : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Pengelola Penerbitan dan Publikasi (Fitri Yuliana), Analis Berita (Raisa Ayuditha Marsaulina)	Nota Dinas (Biasa)	File Surat  klik file 26 Pengadaan Kegiatan Analisis Pemberitaan.pdf

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 data

[Awal](#) [Kembali](#) [Lanjut](#) [Akhir](#)



- Dashboard
- Editing
- News Clipping
- Search
- Connect
- Configurations

Home / Dashboard

Filter

DASHBOARD FILTERS

Periodic Filter
Last Week

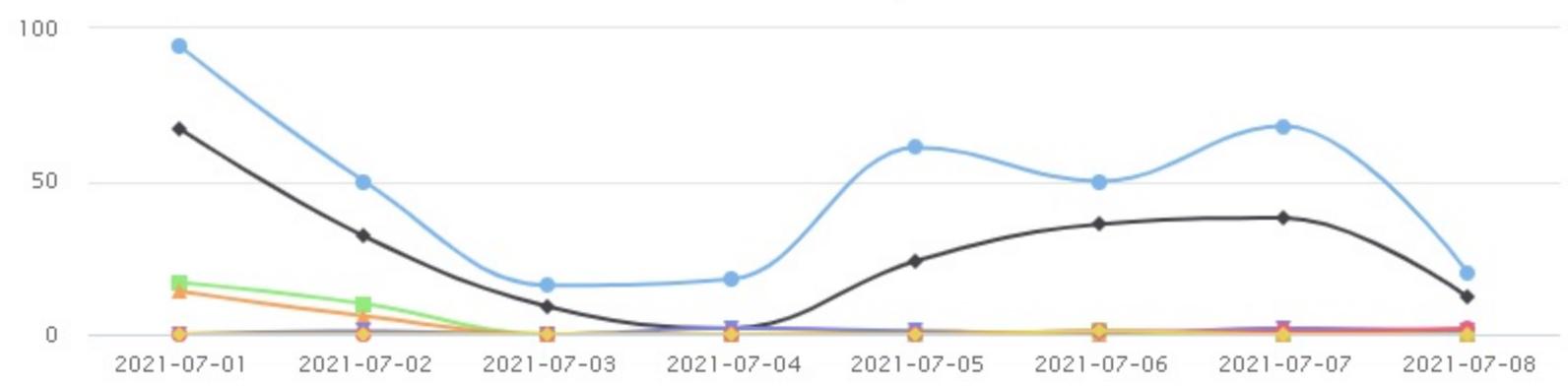
Category Filter
All Group Category

SubCategory Filter
All Sub Category

Group Media Filter
01. All Media

SubMedia Filter
All Sub Media

Media Visibility



Summary

Trending Highlights

Instagram

Search



mahkamahkonstitusi

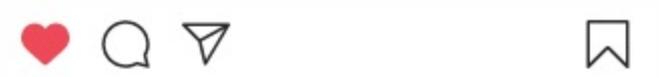
mahkamahkonstitusi Iya itu bukan typo lho #Courtizen. MK menerbitkan naskah UUD 1945 dalam bahasa Jawi.

Konten Tahukah Anda kali ini akan memberikan informasi tentang berbagai naskah UUD 1945 yang sudah diterbitkan MK dalam berbagai macam versi bahasa.

#Courtizen bisa mengunduh naskahnya secara gratis melalui laman mkri.id di menu peraturan. 😊

#MengawalKonsitusi #salaMKonsitusi #MKRI

34w



312 likes

NOVEMBER 11, 2020

Add a comment... Post

Sent Items Filter

Pemenuhan Permohonan Informasi a.n. Anah 9/3/2021
Yth. Ibu Andhini, Perkenalkan, saya Raisa Ayuditha, st...

andhini.sayufauzia@gmail.com 📎
Pemenuhan Permohonan Informasi a.n. Andh 9/3/2021
Yth. Ibu Andhini, Perkenalkan, saya Raisa Ayuditha, st...

Andhini Sayu Fauzia, S.I.Kom 📎
Pemenuhan Permohonan Informasi 9/3/2021
Yth. Ibu Andhini, Perkenalkan, saya Raisa Ayuditha, st...

sekretariat@komisiinformasi.g... 📎
▶ Penyampaian Laporan Layanan Informasi Put 7/5/2021
Yth. Pengelola Surat Elektronik Sekretariat Komisi Inf...

fadia.alaidrus@gmail.com 📎
▶ Pemenuhan Permohonan Informasi a.n. Fadiy 5/5/2021
Yth. Ibu Fadiyah, Perkenalkan, saya Raisa Ayuditha, st...

Fadia Alaidrus 📎
▶ Permohonan Informasi 4/29/2021
Yth. Ibu Fadia Alaidrus, terima kasih atas informasi sal...

panwaskabpurworejo21@gma... 📎
Penyampaian Surat Jawaban Permohonan Inf 4/23/2021
Yth. Bapak/Ibu Admin, Pejabat Pengelola Informasi P...

sekretariat@komisiinformasi.g... 📎
Penyampaian Laporan Layanan Informasi Put 8/24/2020
Yth. Pengelola Surat Elektronik Sekretariat Komisi Inf...

marbunandri2@gmail.com 📎
▶ Pemenuhan Permohonan Dokumentasi 7/13/2020
Yth. Sdr. Andri Marbun, PPID mengucapkan terima k...

juliantasembiring78@gmail.co... 📎
▶ Pemenuhan Permohonan Informasi/Dokumer 7/6/2020
Yth. Bapak Julianta Sembiring, Perkenalkan, saya Rais...

Penyampaian Surat Jawaban Permohonan Informasi

PPID

Fri 4/23/2021, 8:29 AM

panwaskabpurworejo21@gmail.com

↻ Reply all | ▾

7.4.21 Surat Jawaban Pe...

320 KB

▾

Download

Yth. Bapak/Ibu Admin,

Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih atas permohonan informasi yang disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo pada 22 Maret 2021 lalu berkenaan dengan Permohonan Dokumentasi, yaitu foto dan video persidangan Perkara Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Nomor 29/PHP/BUP-XIX/2021. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan surat jawaban yang ditandatangani oleh Kepala Biro Humas dan Protokol dan ditujukan kepada Bapak Nur Kholiq selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Kemudian, berikut kami sampaikan tautan untuk mengakses dokumentasi foto persidangan dimaksud: <https://drive.google.com/drive/folders/1j3ICvQnDYE-k7cidgEmziVTbzSJq5UBu?usp=sharing>

Kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk mengunduh seluruh dokumentasi dalam waktu dekat. Apabila seluruh dokumentasi telah diunduh, mohon sampaikan hal tersebut kepada PPID MK melalui email ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PPID
Mahkamah Konstitusi RI